

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BKPSDM KABUPATEN JAYAPURA

Idham Chalid Daeng Nyengka^{1*}, Elsyah R. Marlissa², Nur Aedah²

¹⁾ Mahasiswa Program Magister kebijakan publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: jdham.mulu@gmail.com

Abstract :

The Local Government Information System (SIPD) integrates development, financial, and local government information to support budgeting. This study aims to analyze the implementation of budgeting through SIPD in BKPSDM Jayapura Regency, using the theory of George C. Edward III theory which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research is important because optimizing the use of SIPD can improve transparency, accountability, and efficiency of local budget management. Communication is realized through socialization by Bapeda to ensure employee understanding of budget preparation. Resources include the readiness of labor, funds, and adequate facilities. Disposition is shown by technical competence and employee understanding of implementation rules. Supportive bureaucratic structures, such as clear procedures and effective coordination, also determine the success of implementation. The results showed that the implementation ran optimally with the support of socialization, employee readiness, and the role of the government, despite facing obstacles such as delays in data input, budget limitations, and constraints on information validity. This implementation is in accordance with Permendagri No. 70/2019 on SIPD.

Abstrak :

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengintegrasikan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah untuk mendukung penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penyusunan anggaran melalui SIPD di BKPSDM Kabupaten Jayapura, menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menjadi penting karena optimalisasi penggunaan SIPD dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan . Komunikasi diwujudkan melalui sosialisasi oleh Bapeda untuk memastikan pemahaman pegawai terkait penyusunan anggaran. Sumber daya meliputi kesiapan tenaga kerja, dana, serta fasilitas yang memadai. Disposisi ditunjukkan oleh kompetensi teknis dan pemahaman pegawai terhadap aturan pelaksanaan. Struktur birokrasi yang mendukung, seperti prosedur yang jelas dan koordinasi efektif, turut menjadi penentu keberhasilan implementasi. Dengan demikian implementasi berjalan optimal dengan dukungan sosialisasi, kesiapan pegawai, dan peran pemerintah, meskipun menghadapi hambatan seperti keterlambatan input data, keterbatasan anggaran, dan kendala validitas informasi. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Keyword: Implementation, Regional Government Information Systems, Budget Preparation, BKPSDM, Jayapura Regency

PENDAHULUAN

Penganggaran di sektor publik sangat kompleks dan politis. Di sektor publik, penyusunan anggaran adalah proses politik. Semua informasi mengenai penganggaran harus disediakan untuk umum agar dapat dikritik dan diberi umpan balik. Anggaran sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik (Mardiasmo, 2005:61). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan dalam satuan uang. Tahap penganggaran merupakan tahap yang sangat penting. Hal ini karena anggaran

yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan rencana yang telah disusun dengan baik. Anggaran adalah rencana tindakan manajerial untuk memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi (Mulyadi, 2016). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, sektor publik harus menerapkan prinsip transparansi (Bastian, 2006).

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada dengan membentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan transparan, yang mana hal ini penting untuk mendukung tercapainya penganggaran yang baik di Indonesia. SIPD juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai salah satu bentuk penerapan e-government yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Jayapura merupakan salah satu pemerintah daerah yang menggunakan SIPD, khususnya SIPD yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Berdasarkan arahan Permendagri No. 64 Tahun 2020, mulai tahun 2020, rancangan APBD harus mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta

rancangan APBD harus disusun secara elektronik menggunakan SIPD.

Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di BKPSDM Kabupaten Jayapura tidaklah mudah karena aplikasi ini masih baru, kurangnya pelatihan, dan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara bagian program dan keuangan di sekretariat OPD. Kendala lainnya adalah masalah teknis dalam penginputan data ke SIPD karena keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia. Diskominfo menyediakan perangkat akses untuk operator agar dapat menggunakan SIPD, meskipun masih terdapat hambatan terkait waktu, anggaran pemerintah, dan validitas informasi di SIPD.

Sebelumnya, BKPSDM Kabupaten Jayapura menggunakan SIMDA tanpa kendala, namun pada pertengahan tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD. Dalam implementasinya, proses penganggaran sering tertunda karena standar satuan harga (SSH) yang tidak seragam, sehingga penganggaran tidak dapat dilakukan jika SSH belum terdaftar dalam sistem dan harus diajukan terlebih dahulu.

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan terpenting dalam siklus kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi dari banyak faktor. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi penganggaran berbasis kinerja adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward (1980), terdapat empat variabel

dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau watak, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus diimplementasikan secara simultan.

Penelitian Karubaba (2020) berjudul "*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Provinsi Manokwari, Papua Barat*" menemukan bahwa pejabat dan OPD belum memahami prosedur SIPD dengan baik. Hal ini menyebabkan implementasi SIPD sering tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga efektivitasnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belum optimal.

Di Kabupaten Jayapura, kendala seperti keterbatasan jaringan, kurangnya pelatihan, serta perbedaan standar satuan harga (SSH) semakin memperumit proses penganggaran melalui SIPD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implementasi SIPD dalam penyusunan anggaran di BKPSDM Kabupaten Jayapura, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD di lingkungan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik untuk satu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2013:11).

Lokasi penelitian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Hal ini dikarenakan instansi ini termasuk pengguna program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BKPSDM Kabupaten Jayapura.

Informan penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura, Koordinator Sub Bagian Program Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura, dan Staf Sub Bagian Program Kesekretariatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura.

Menurut Sugiyono (2016:305), instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dengan kata lain, peneliti menjadi instrumen untuk mencatat informasi selama penelitian berlangsung. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Selain itu, instrumen lainnya yang digunakan adalah alat perekam dan pedoman wawancara (Arikunto, 2010). Menurut Sugiyono (2013:194), jenis data dan sumber informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Patton dalam Emzir (2011:65), teknik dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung proses implementasi SIPD di BKPSDM Kabupaten Jayapura, termasuk interaksi antara pengguna aplikasi dan kendala yang dihadapi selama penginputan data. Teknik wawancara dilakukan dengan melibatkan narasumber

yang relevan, seperti pejabat BKPSDM, operator SIPD, dan staf terkait, untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pemahaman, serta tantangan dalam penggunaan SIPD. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, seperti kebijakan, pedoman teknis, laporan kegiatan, dan data anggaran, yang mendukung analisis implementasi sistem secara komprehensif. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi SIPD dalam konteks penelitian. Kemudian, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (dalam Emzir, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pada BKPSDM Kabupaten Jayapura

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura dianalisis berdasarkan teori Edward III, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan karena memberikan kerangka komprehensif dalam menganalisis implementasi kebijakan publik dari perspektif pelaksana kebijakan (Agustino, 2017; Winarno, 2012).

Komunikasi

Komunikasi menjadi kunci penting dalam penyusunan anggaran melalui

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Setiap aktor pelaksana kebijakan perlu mengetahui maksud, tujuan, dan prosedur yang harus dilakukan. Jika terdapat kesenjangan informasi, pelaksana dapat salah memahami tugasnya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian hasil yang optimal. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kebingungan pelaksana hingga kegagalan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan SIPD telah berjalan dengan baik. Bappeda telah melaksanakan sosialisasi terkait sistem ini, melatih operator SIPD untuk meningkatkan kompetensi, serta menetapkan jadwal penyusunan anggaran secara jelas. Selain itu, disediakan pusat layanan pengaduan dan tim ahli yang responsif dalam menangani kendala teknis. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pelaksanaan SIPD berjalan dengan koordinasi yang baik antara semua pihak, sehingga mendukung keberhasilan penyusunan anggaran.

Sumber Daya

Sumber daya manusia yang memadai merupakan elemen vital dalam pelaksanaan kebijakan SIPD. Jumlah staf yang cukup dan kompeten sangat diperlukan untuk memastikan proses penyusunan anggaran berjalan lancar. Namun, jika sumber daya manusia tidak mencukupi atau memiliki keterampilan yang kurang, maka pelaksanaan kebijakan akan terganggu. Di samping itu, sumber daya lain seperti pendanaan, fasilitas kerja, dan alat pendukung juga menjadi bagian

penting yang harus tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

Analisis menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah staf menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan SIPD. Banyak pelaksana kebijakan yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai sehingga proses penganggaran menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, fasilitas kerja dan pendanaan harus ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan implementasi SIPD secara menyeluruh.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi SIPD. Dukungan dari pimpinan dan pembuat kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam memastikan bahwa pelaksana memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan tugas. Dukungan ini dapat berupa penetapan kebijakan sebagai prioritas, pemberian insentif, serta penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program. Namun, sering kali pelaksana kebijakan tidak mendapatkan dukungan yang cukup, sehingga kinerjanya tidak maksimal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana kebijakan dalam penyusunan anggaran melalui SIPD sudah cukup baik. Para pelaksana melaksanakan tugas sesuai arahan yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan SIPD. Namun, untuk lebih meningkatkan efektivitas, perlu adanya insentif tambahan yang dapat memotivasi pelaksana agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien dan mendukung menjadi salah satu faktor utama keberhasilan implementasi SIPD. Birokrasi yang rumit dan tidak terkoordinasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama lintas unit, sehingga koordinasi dan pembagian tugas yang jelas menjadi sangat penting. Jika tidak ada koordinasi yang baik, implementasi kebijakan akan mengalami banyak hambatan, baik dari segi teknis maupun administratif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi SIPD masih memiliki kelemahan, khususnya ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk penganggaran berbasis hasil. Tanpa SOP, pelaksana tidak memiliki panduan yang terstruktur, sehingga proses kerja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan SOP yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan SIPD berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan adanya SOP, setiap pelaksana dapat bekerja lebih terarah, akuntabel, dan mampu mencapai hasil yang maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Bkpsdm Kabupaten Jayapura

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa tidak ada hambatan signifikan dalam penyusunan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan lebih berhubungan dengan proses sebelum dan selama penyusunan anggaran dengan menggunakan SIPD.

Faktor Pendukung

Peran Pemerintah, Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting sebagai faktor pendukung dalam implementasi penyusunan anggaran melalui SIPD pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Peran administrasi, terutama keterlibatan kepala daerah dalam proses penganggaran menggunakan SIPD, memiliki dampak besar terhadap kelancaran pelaksanaan sistem ini. Keterlibatan langsung dari pimpinan daerah memastikan adanya perhatian penuh terhadap pentingnya sistem ini dan mendorong pelaksanaannya dengan baik di tingkat pemerintahan daerah.

Dukungan Masyarakat, Analisis menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dalam pemerintahan daerah mencakup beberapa aspek penting, seperti partisipasi dalam perumusan peraturan dan kebijakan publik, serta dalam pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam (SDA), serta dalam pelayanan publik. Semua bentuk dukungan ini memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk penggunaan SIPD, dengan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk tercapainya tujuan bersama.

Faktor Penghambat

Waktu, Analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan anggaran sering kali menjadi faktor penghambat. Proses penginputan data ke dalam SIPD terkadang mengalami keterlambatan, yang berimbas pada terlambatnya penyusunan anggaran. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan

anggaran yang telah direncanakan, sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan waktu yang cukup bagi setiap tahapan penyusunan anggaran.

Anggaran Pemerintah, Sebuah faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SIPD. Biaya yang signifikan diperlukan untuk mendukung proses ini, termasuk dalam hal pelatihan, fasilitas, dan pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan alokasi anggaran yang memadai agar pelaksanaan program SIPD dapat berjalan lancar dan efektif. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, implementasi sistem ini akan terbatas dan tidak optimal.

Informasi Tidak Valid, Selain itu, masalah informasi yang tidak valid terkadang menjadi hambatan dalam implementasi SIPD. Meskipun masalah ini tidak terjadi secara sering, namun ketika informasi yang disampaikan tidak valid atau akurat, hal ini dapat menghambat proses penginputan data dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam SIPD selalu diperbarui dan diverifikasi, agar keputusan yang diambil dapat didasarkan pada data yang benar dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Implementasi penyusunan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BKPSDM Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil yang beragam. Komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda dalam rangka sosialisasi SIPD berjalan dengan baik, mendukung pelaksanaan penganggaran secara efektif. Namun, kesiapan dan ketersediaan sumber daya di BKPSDM masih memerlukan peningkatan untuk mendukung implementasi yang optimal. Meskipun

demikian, pemahaman terhadap aturan-aturan terkait penganggaran melalui SIPD, yang mencerminkan disposisi atau sikap pelaksana, telah cukup optimal. Dari sisi struktur birokrasi, BKPSDM terlibat aktif dalam memberikan masukan teknis, memastikan bahwa penyusunan anggaran berbasis hasil dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor pendukung implementasi penyusunan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di BKPSDM Kabupaten Jayapura meliputi peran aktif Kepala BKPSDM dalam memberikan motivasi serta mendukung keberhasilan pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat yang mendukung pelaksanaan penganggaran dengan memberikan pelayanan terbaik. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterlambatan dalam penginputan data penganggaran, anggaran pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi sistem SIPD, serta kendala informasi yang tidak valid. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diatasi dengan upaya cepat dan tepat, sehingga pelaksanaan penganggaran melalui SIPD tetap berjalan dengan baik.

Dengan demikian, implementasi penyusunan penganggaran melalui SIPD di BKPSDM Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil yang positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Peran aktif dari Kepala BKPSDM dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan sistem ini. Di sisi lain, kendala yang muncul, seperti keterlambatan penginputan data dan masalah terkait anggaran serta validitas informasi, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan anggaran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem ini. Hal ini juga

menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif dan sosialisasi yang berkelanjutan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Pelaksanaan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memerlukan komitmen dan arahan yang jelas dari para pimpinan di semua tingkat pemerintahan. Implementasi penganggaran dengan menggunakan SIPD harus didukung oleh komitmen kuat dan arahan yang tegas dari pimpinan di setiap tingkatan pemerintahan. Dukungan ini akan memastikan proses penganggaran berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kedua, Diharapkan adanya sosialisasi dan pelatihan secara berkala bagi pimpinan dan staf mengenai pelaksanaan penganggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Agar penggunaan SIPD dapat diterima dengan baik, diperlukan sosialisasi yang intensif dan pelatihan berkelanjutan bagi para pimpinan dan staf yang terlibat. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka tentang sistem ini, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi penganggaran.

Ketiga, Diharapkan tersusunnya pedoman dan bahan acuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk mendukung pelaksanaan penganggaran yang efektif, pedoman dan bahan acuan yang lebih

mendetail sangat diperlukan. Ini akan memberikan panduan yang jelas kepada setiap pihak terkait mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menggunakan SIPD.

Keempat, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) untuk setiap unit kerja di BKPSDM Kabupaten Jayapura diharapkan dapat ditetapkan dengan jelas. Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Standar

Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang jelas untuk setiap unit kerja di BKPSDM akan membantu dalam mengatur tugas dan tanggung jawab secara lebih efisien. Hal ini juga memastikan bahwa setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press: Washington D.C.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali: Jakarta.
- Karubaba, C. F. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Tesis Diploma*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3. Sage Publications: USA. (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press).
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Selemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Wahab, A. S. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.